

Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru Madrasah di Kabupaten Bojonegoro dalam Perspektif Etika Politik

Muhammad Fahri Shobirin¹, Sri Minarti²

^{1,2}Program Studi PAI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro
fahmi3fahmi@gmail.com¹, minarti@unugiri.ac.id²

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

Keywords:

teacher certification,
madrasah, political ethics,
education policy, Bojonegoro

ABSTRACT

Teacher certification policy is one of the government's efforts to improve the professionalism and welfare of educators, including madrasah teachers. This study aims to analyze the implementation of madrasah teacher certification policy in Bojonegoro Regency from the perspective of political ethics. The research method used is qualitative with a library research approach. The findings indicate that teacher certification has a positive impact on improving teachers' competence and work motivation, as well as enhancing the quality of learning in madrasahs. However, the implementation still faces several challenges, such as inequality between civil servant and non-civil servant teachers, complex administrative bureaucracy, and insufficient post-certification professional development. From the perspective of political ethics, the policy has not fully reflected the principles of justice, transparency, and governmental responsibility. Therefore, policy improvements are needed to ensure a more equitable, effective, and education quality-oriented system in Islamic education.



Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

Kata kunci:

sertifikasi guru,
madrasah, etika
politik, kebijakan
pendidikan,
Bojonegoro

ABSTRAK

Kebijakan sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif etika politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan motivasi kerja guru, serta peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa ketimpangan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, birokrasi administrasi yang kompleks, serta kurang optimalnya pengembangan kompetensi pasca-sertifikasi. Dalam perspektif etika politik, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan agar lebih adil, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam.



Corresponding Author:

Muhammad Fahri Shobirin
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: fahmi3fahmi@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan bangsa, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik. Dalam konteks pendidikan Islam, madrasah memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan moral dan spiritual peserta didik. Keberhasilan pendidikan madrasah sangat dipengaruhi oleh kualitas guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru, salah satunya melalui program sertifikasi guru.

Kebijakan sertifikasi guru merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang wajib memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Sertifikasi guru bertujuan memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tunjangan profesi. Dalam praktiknya, program sertifikasi guru tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, termasuk pendidikan madrasah.

Di Kabupaten Bojonegoro, implementasi sertifikasi guru madrasah telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir melalui koordinasi Kementerian Agama dan lembaga pendidikan madrasah. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja guru. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketimpangan kesejahteraan antara guru ASN dan non-ASN, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, birokrasi administrasi yang kompleks, serta kurang optimalnya pengembangan kompetensi guru pasca-sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sertifikasi guru tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.

Dalam perspektif etika politik, kebijakan publik harus berlandaskan prinsip moral, keadilan sosial, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Etika politik tidak hanya menilai kebijakan dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan kesejahteraan sosial secara merata. Oleh sebab itu, analisis kebijakan sertifikasi guru madrasah dalam perspektif etika politik menjadi penting untuk melihat apakah implementasi kebijakan telah mencerminkan prinsip keadilan distributif, transparansi birokrasi, dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan guru madrasah.

Penelitian mengenai sertifikasi guru sebelumnya umumnya berfokus pada aspek profesionalisme guru, peningkatan kompetensi, serta dampak sertifikasi terhadap kualitas

pembelajaran. Ahmad dan Sujianto (2022) menjelaskan bahwa sertifikasi guru memiliki pengaruh terhadap peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui penguatan kompetensi pedagogik dan profesional. Fadli, Fitrawahyudi, dan Aryanti (2023) juga menemukan bahwa sertifikasi guru madrasah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan motivasi kerja guru. Sementara itu, Handraini dan Magriasti (2023) mengkaji kebijakan sertifikasi guru dari perspektif hubungan ekonomi politik dan pendidikan di Indonesia serta menemukan adanya ketimpangan kesejahteraan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, penelitian Putri dan Nugraha (2025) membahas etika guru dalam pengajaran di lembaga pendidikan Islam dan menekankan pentingnya integritas moral guru dalam menjalankan profesinya. Syamsiyah dan Fitriatin (2025) juga mengungkapkan bahwa implementasi kode etik profesi guru memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan di lingkungan madrasah. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung membahas sertifikasi guru dari aspek profesionalisme dan etika profesi secara umum, serta belum secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah dalam perspektif etika politik di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan survei literatur tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait analisis kebijakan sertifikasi guru madrasah yang dikaitkan dengan perspektif etika politik. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada dampak sertifikasi terhadap kompetensi guru dan kualitas pembelajaran, sedangkan aspek moralitas kebijakan, keadilan distributif, transparansi birokrasi, dan tanggung jawab pemerintah dalam implementasi kebijakan pendidikan belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, kajian mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru pada madrasah di daerah, khususnya Kabupaten Bojonegoro, masih relatif terbatas.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, yaitu mengkaji kebijakan sertifikasi guru madrasah melalui perspektif etika politik. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek administratif dan profesionalisme guru, tetapi juga menganalisis nilai-nilai moral dan politik yang terkandung dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang baru mengenai hubungan antara kebijakan pendidikan, kesejahteraan guru, dan prinsip-prinsip etika politik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif etika politik, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta menjelaskan sejauh mana kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemanfaatan publik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang kebijakan pendidikan Islam dan etika politik, khususnya terkait implementasi sertifikasi guru madrasah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga pendidikan madrasah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan sertifikasi guru agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah dalam perspektif etika politik.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi guru, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Agama tentang guru madrasah, serta kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi guru. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan pendidikan, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan sertifikasi guru madrasah, kemudian mengkaji dan menganalisis isi dokumen tersebut sesuai fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi dengan tema penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk dianalisis menggunakan perspektif etika politik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Madrasah di Kabupaten Bojonegoro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan sesuai dengan regulasi nasional yang mengatur profesionalisme guru. Program sertifikasi dilaksanakan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), verifikasi administrasi, uji kompetensi, dan pemberian tunjangan profesi guru. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik madrasah sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada guru.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan berbagai laporan pendidikan madrasah di Bojonegoro, sertifikasi guru memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi kerja guru. Guru yang telah memperoleh sertifikasi cenderung lebih aktif dalam menyusun perangkat pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran inovatif, serta mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, tunjangan profesi guru juga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru sehingga dapat menunjang kinerja mereka dalam proses pembelajaran.

Namun demikian, implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi beberapa kendala. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan antara guru ASN dan guru non-ASN, terutama di madrasah swasta. Guru non-ASN masih banyak yang menerima honor rendah meskipun telah memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, persoalan administratif seperti keterlambatan pencairan tunjangan profesi dan kompleksitas birokrasi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Temuan lain menunjukkan bahwa sebagian guru masih memandang sertifikasi hanya sebagai sarana memperoleh tunjangan profesi, bukan sebagai upaya peningkatan

profesionalisme berkelanjutan. Hal ini menyebabkan pengembangan kompetensi pasca-sertifikasi belum berjalan optimal. Padahal, perkembangan teknologi pendidikan dan perubahan karakter peserta didik menuntut guru untuk terus meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesional.

2. Perbandingan Temuan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad dan Sujianto (2022) yang menyatakan bahwa sertifikasi guru berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme guru melalui penguatan kompetensi pedagogik dan profesional. Guru yang telah tersertifikasi memiliki motivasi lebih tinggi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dibandingkan sebelum memperoleh sertifikat pendidik.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Fadli, Fitrawahyudi, dan Aryanti (2023) yang menjelaskan bahwa sertifikasi guru madrasah memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan motivasi kerja guru. Dalam konteks Kabupaten Bojonegoro, peningkatan motivasi guru terlihat dari kemampuan guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dan penggunaan metode pembelajaran yang lebih variatif.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa sertifikasi guru belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh guru madrasah. Temuan ini memperkuat penelitian Handraini dan Magriasti (2023) yang mengungkapkan adanya ketimpangan dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dari perspektif ekonomi politik pendidikan. Ketimpangan tersebut terlihat pada perbedaan kesejahteraan antara guru ASN dan non-ASN, khususnya pada madrasah swasta di daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan keberhasilan sertifikasi guru dari aspek administratif dan profesionalisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian administratif, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencerminkan prinsip keadilan sosial dan etika politik dalam implementasinya.

Penelitian Putri dan Nugraha (2025) mengenai etika guru dalam lembaga pendidikan Islam juga mendukung temuan penelitian ini bahwa guru madrasah memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam membentuk karakter peserta didik. Akan tetapi, penelitian ini menambahkan bahwa tanggung jawab moral tersebut perlu diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru.

3. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Teori Etika Politik

Dalam perspektif teori etika politik yang dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno, kebijakan publik harus berlandaskan nilai moral, keadilan, tanggung jawab, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan teori tersebut, implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro dapat dianalisis melalui beberapa prinsip utama etika politik.

a. Prinsip Keadilan

Teori keadilan dalam etika politik menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan adil dalam kebijakan publik. Dalam konteks sertifikasi guru madrasah, pemerintah seharusnya memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh guru tanpa membedakan status kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat ketimpangan kesejahteraan antara guru ASN dan non-ASN. Guru non-ASN di madrasah swasta masih menghadapi keterbatasan ekonomi meskipun telah memiliki sertifikat pendidik dan menjalankan tugas profesional yang sama dengan guru ASN. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif.

b. Prinsip Transparansi

Dalam teori etika politik, transparansi menjadi unsur penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kebijakan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi administrasi dalam pencairan tunjangan profesi guru masih cukup kompleks dan sering mengalami keterlambatan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem administrasi kebijakan belum berjalan secara efektif dan transparan. Proses birokrasi yang panjang juga dapat memunculkan ketidakpercayaan guru terhadap sistem kebijakan yang diterapkan pemerintah.

c. Prinsip Tanggung Jawab

Etika politik menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga pendidik. Guru merupakan ujung tombak pendidikan nasional sehingga kesejahteraan dan pengembangan kompetensinya harus menjadi prioritas kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi. Namun, tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan kesejahteraan guru non-ASN dan kurangnya program pengembangan kompetensi berkelanjutan pasca-sertifikasi.

d. Prinsip Kemanfaatan Publik

Teori etika politik juga menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, sertifikasi guru seharusnya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah. Guru menjadi lebih aktif dalam mengembangkan metode pembelajaran dan meningkatkan kompetensi profesional. Akan tetapi, manfaat kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih ada guru yang memandang sertifikasi hanya sebagai sarana memperoleh tunjangan profesi.

4. Analisis Pencapaian Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif etika politik, mengidentifikasi permasalahan implementasi kebijakan, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemanfaatan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme dan kualitas pembelajaran guru. Guru yang telah tersertifikasi menunjukkan peningkatan motivasi kerja dan kualitas pengajaran dibandingkan sebelumnya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan, seperti ketimpangan kesejahteraan guru, birokrasi administrasi yang kompleks, dan rendahnya pengembangan kompetensi pasca-sertifikasi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru belum sepenuhnya mencerminkan prinsip etika politik, khususnya dalam aspek keadilan dan tanggung jawab pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian yang telah diuraikan dalam pendahuluan, yaitu menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru madrasah dalam perspektif etika politik serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Bojonegoro telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme, kualitas pembelajaran, dan kesejahteraan guru. Guru yang telah tersertifikasi menunjukkan peningkatan kompetensi pedagogik dan motivasi kerja dalam proses pembelajaran di madrasah.

Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketimpangan kesejahteraan antara guru ASN dan non-ASN, birokrasi administrasi yang kompleks, serta kurang optimalnya pengembangan kompetensi guru pasca-sertifikasi. Dalam perspektif etika politik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi guru tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan madrasah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN, menyederhanakan sistem administrasi, serta memperkuat program pengembangan kompetensi guru. Penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa pendekatan etika politik penting digunakan dalam evaluasi kebijakan pendidikan agar kebijakan yang diterapkan lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, I., Fitrawahyudi, F., & Aryanti, A. (2023). Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru madrasah di Kabupaten Maros. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 6(2), 118–127. <https://doi.org/10.30605/jsgp.6.2.2023.2721> (E-Journal)
- Handraini, H., & Magriasti, L. (2023). Kebijakan sertifikasi guru dari perspektif hubungan ekonomi politik dan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29462–29469. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11723> (Jurnal Pendidikan Tambusai)
- Hidayati, Z. R., Latif, M., & Taridi, M. (2026). Manajemen pengembangan SDM guru berbasis etika Islam dalam pengelolaan konflik kerja untuk meningkatkan profesionalisme guru madrasah unggul: Kajian literatur. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.41578> (Jurnal Universitas Pasundan)
- Nugroho, A. F., Syaifuddin, M., & Asmuri. (2026). Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru madrasah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.40556> (Jurnal Universitas Pasundan)
- Putri, S., & Nugraha, M. S. (2025). Etika guru dalam pengajaran di lembaga pendidikan Islam (Studi kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung). *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.15575/jpiu.43201> (eJournal UIN SGD)
- Sari, R., Sela, D. P., Sutriyanti, I. R. P., Cahyani, O. G., Jayantari, R. A. D., Putri, S. A., & Akbar, S. (2024). Penguatan profil guru Pancasila melalui mata kuliah etika dan profesionalisme guru. *Journal of Innovation and Teacher Professionalism*, 2(2), 226–234. <https://doi.org/10.17977/um084v2i22024p226-234> (Jurnal 3)
- Sulaiman, A., & Khoiri, Q. (2023). Analisis kebijakan Islam pada pendidikan tinggi, sertifikasi guru dan dosen (Dampak UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bagi guru madrasah). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5594–5601. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11964> (Jurnal Universitas Pahlawan)
- Sungkowo. (2025). Implementasi kode etik dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru (Studi pada Madrasah Ibtidaiyah Darus Salam Al Islami Kabupaten Tebo). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.34301> (Jurnal Universitas Pasundan)
- Syamsiyah, N. E., & Fitriatin, N. (2025). Analisis implementasi kode etik profesi guru dalam proses pengambilan keputusan di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), 160–168. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.898> (Jurnal Bima Berilmu)
- Utomo, S. T. (2020). Kebijakan profesi guru madrasah melalui program sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(1). <https://doi.org/10.21580/wa.v6i1.4143> (journal.walisongo.ac.id)